

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN DAN ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
SUATU KAJIAN KEWENANGAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

Steven Mart

1940050053



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN DAN ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
SUATU KAJIAN KEWENANGAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Steven Mart

1940050053



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Mama, abang, kakak

Serta

Bagi bangsaku tercinta Indonesia



1 Korintus 1:5

Sebab di dalam Yesus kamu telah

Menjadi kaya dalam segala hal,

Dalam segala macam perkataan

Dan segala macam pengetahuan

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Mart
NIM : 1940050053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 8 Februari 2023




Steven Mart



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

Oleh:

Nama : Steven Mart
NIM : 1940050053
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 8 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
NIDN : 0017115803

Pembimbing II

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.
NIDN : 0314049005

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN : 03270046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIDN : 0302117904



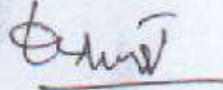

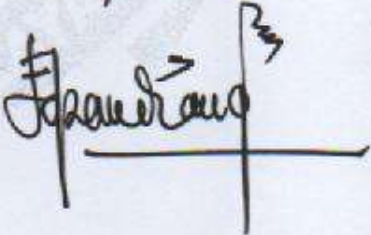
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 8 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Steven Mart
NIM : 1940050053
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., M.M	Sebagai Ketua	
2. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 8 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN
DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE DAAD)
SUATU KAJIAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Steven Mart

NIM : 1940050053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 8 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

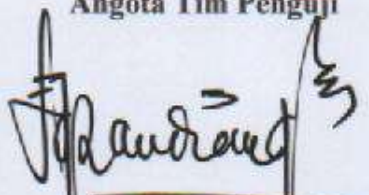
Anggota Tim Penguji



I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji



L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Mart
NIM : 1940050053
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif dengan Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 8 Februari 2023



Steven Mart

KATA PENGANTAR

Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kerap kali menemukan ketidakadilan terhadap hal sewenang-wenang oleh penguasa. Hal tersebut lahir dan hadir karena keserakahan terhadap kekuasaan. Keserakahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara hukum, demokrasi, juga melanggar asas-asas umum yang baik dalam dalam pemerintahan. Tindakan penyalahgunaan wewenang dari apa yang sudah diberikan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, bertindak tanpa memikirkan akibat yang nantinya timbul dari apa yang akan dilakukannya dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Banyak timbul penafsiran dengan kata perbuatan melawan hukum, namun yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara disebut sebagai badan dan atau pejabat pemerintahan yang bertindak secara sewenang-wenang.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan dalam hal terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan untuk Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa serta memutus terhadap perkara tersebut.

Penulis sangat berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan saran serta bimbingan hikmat pengetahuannya. Tak lupa penulis ingin berterima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul:

**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
BADAN DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN SUATU KAJIAN
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”**

Penulisan hukum ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program strata satu dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, sehingga penulis bersedia menerima kritik dan saran dari para pembaca guna membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga di kemudian hari penulisan hukum ini bermanfaat bagi proses pembangunan sistem hukum baik juga pemerintahan, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum administrasi negara.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.

Jakarta, 29 Januari 2023

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan bantuannya secara moril, materiil dan spiritual, yang langsung atau tidak langsung, untuk diberikan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini, termasuk menyelesaikan kuliah di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Perguruan Tinggi tempat penulis belajar dan mendapatkan ilmu.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi penulis, terima kasih untuk semua masukan dan pembelajaran juga ilmu yang Ibu ajarkan kepada saya.
6. Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi penulis, terima kasih untuk semua masukan dan pembelajaran juga ilmu yang Bapak ajarkan kepada saya.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Alm. Ayahku “Solo Samuel Sitanggang” yang sudah merawat, memelihara, menemani selama 12 tahun, yang sekarang sudah senang dan bahagia karena terlebih dahulu mendapatkan tiket untuk ke Sorga. Untuk Ibu “Rosdiana Hutagalung”, terima kasih untuk setiap doa,

didikan, pelajaran hidup dan semua apa yang dipunya untuk diberikan kepada anakmu ini. Aku sayang kalian semua.

9. Abangku Riko Wibawa Sitanggung dan kakak Mutiara Stephani, terima kasih sudah banyak dan terus selalu membina adikmu ini tetap dalam pengawasanmu. Khususnya untuk abangku, terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal untuk diketahui dan dipelajari, terimakasih sudah mengenalkan ku dengan musik, idealisme, cara berpikir yang baik, juga mengajakku untuk membangun generasi dalam profesi yang dilakukan dengan sukacita dengan membimbing saya ke dalam Fakultas Hukum sebagai awalnya.
10. Teman teman X-1, XI dan XII IPS SMA St. Fransiskus 2 Jakarta Timur angkatan 2019, Carel Kusuma, Markus Togi, Josua Raun, Jonatan Onasys, Christian Marcelino a.k.a Bidin, Salomo Oktaviando, Daniel Hendrik, Anton Jugul, Yosua Leonardo, Ivan Silitonga, Farrel Turangan, Cindy Refra, Mikkania Damayanti, Briza Natalia, Grace Johani, Rahel Abigail, Mutiara Amanda, Ribka Tobing, Yudith Kezia, Sara Dawis, Vikaris Vinge, dan lain-lain yang tak tersebutkan, terima kasih teman teman seperjuanganku untuk senang, suka dan duka yang dibentuk selama masa putih abu yang kita alami. *“Pax Et Bonum”*
11. Kawan kawan *“Opung Squad”* dan *“Rumah Yere”*, Ezra Amazia, Jeremi Haposan, Marvel Adrial, Joshua Petra, Bernandus Theo, Gabriel Maruba, Yehezkiel Yohel, Muhammad Fahri, Aldi Kosakoy, Rio Leonard, Yeremia Alexander, Josua Sitepu, Graviaan Joshal, Jeremi Samuel, Kevin Ronaldinho, Michael Agape, dan semua yang lainnya. Makasih yaa lae dan abang-abangku semua untuk cerita dan hal bodoh yang kita pernah buat bersama, yang kalo ketemu ceritanya masih cerita yang lama dan dengan ketawa yang sama, gokil lau semua..... *“Parentesco Uno Vertarkungen”*
12. Pasukan bang ed dan rumrel, Ikhlas, Reza, Dame, Kevin, Fakhi, Kenny, Hosea, Viktor, nongkronggg lah, makan nasi goreng kita *“the one and only bang ed”*

13. Kelas reguler B Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dari botak dan gondrong bareng, ingat perjuangan kita kawan lari dari para jenderal pajak dan abang-abangan kalo mau dikumpuln!!!!
14. Teman teman seperjuangan dalam membuat penulisan skripsi, David Kristo, Yehuda Revival, Brian Rifaldo, Fandy Jose, Marrio Nicholas, Crespo Desnito, Grace Rosalinda, Ingrid Palmarum, Menanti Debora, dan semua yang lainnya. Terima kasih semuanya...
15. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, nama-nama yang kalau disebutkan satu persatu tidak akan cukup dikertas ini. Terima kasih untuk perjuangan, keceriaan, dan semua hal yang sudah kita bentuk untuk sebagai memori untuk kemudian hari selama masa perkuliahan, Terima kasihhh....
16. Kantin UKI, Ropit Pulomas dan Ampera, Warung dewa, Jalan wahab III dan teman teman gang yang masih kadang ngumpul, valent, kinu, nazif, lord tirto, nugi, bujek, wowor, dan semua tempat nongkrongku dimanapun itu, terima kasih banyak sudah memberikan rasa senang dan tawa bersama tanpa lelah sepanjang malam.
17. Dan terakhir untuk Anisa Oktiani Nasution, terima kasih untuk semua bantuan baik tenaga, waktu, pikiran, moril dan lainnya, terlebih canda dan tawa yang kau berikan kepada penulis selama ini, "*you are the best person, i've ever met*". Terima kasih untuk doa-doa kau sampaikan pada-Nya untuk diriku.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Data	14
3. Metode Pendekatan	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	19
A. Negara	19
1) Pengertian Negara	19
2) Negara Hukum	20
B. Pemerintahan.....	26
1.) Pengertian pemerintahan	26

2.) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	31
C. Sistem Hukum	34
1) Teori Efektivitas Hukum	37
D. Peradilan.....	39
E. Peradilan Administrasi.....	40
BAB III.....	47
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (<i>ONRECHTMATIGE DAAD</i>).....	47
A. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan.....	47
B. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (<i>ONRECHTMATIGE DAAD</i>).....	51
BAB IV.....	63
Langkah hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Produk Tata Usaha Negara secara sewenang-wenang.....	63
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

ABSTRAK

- A. Nama : Steven Mart
B. NIM : 1940050044
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
E. Halaman : i-xvi 99 halaman + daftar pustaka
F. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang, Peradilan Tata Usaha Negara
G. Ringkasan Isi :

Penguasa negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya juga sebagai penyelenggara negara dengan diberikan kewenangan oleh negara, namun sering kali kewenangan itu disalah artikan oleh beberapa pihak. Bentuk dari penyalahgunaan wewenang tersebut memberikan dampak yang merugikan orang lain seperti halnya adalah warga masyarakat. Undang-undang dirasa tidak adil keberadaannya untuk masyarakat, jika pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu melanggar atau melakukan hal lebih atau kurang dari apa yang seharusnya ia lakukan sebagaimana terdapat dalam peraturan tersebut.

Metode Penelitian ini merupakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer primer yaitu perundang undangan dan putusan bahan hukum sekunder pendapat para ahli.

Salah satu dari sekian banyak fungsi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan publik (*public service*) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan atau keperluan dari pada warga masyarakat. Memberikan pelayanan tersebut dikatakan sebagai pelayanan administrasi pemerintahan. Tindakan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pelayanan administrasi tersebut dalam hal menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dapat membawa dampak rugi kepada orang lain, seperti disebutkan dalam pasal 9 UU No. 51 Tahun 2009, dimana keputusan Tata Usaha Negara merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Timbulnya akibat hukum bagi orang lain atas munculnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat menerima, memeriksa, dan memberikan hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- H. Daftar Acuan : 27 buku + 5 peraturan perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH
Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 28 Januari 2023
Penulis

Steven Mart

ABSTRACT

- A. Name : Steven Mart
B. S.I.N : 1940050053
C. Speciality Program/Department : State Administrative Law
D. Title : Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
E. Page : i-xvi 99 page + bibliography
F. Keywords : Unlawful Acts, Government Agencies and or Officials, Abuse of Authority, State Administrative Courts
G. Content Summary :

State authorities have an obligation to carry out their duties as state administrators by being given authority by the state, but often this authority is misinterpreted by several parties. This form of abuse of authority has a detrimental impact on other people as well as citizens. The law is felt to be unfair for the community, if the government as the legislator violates or does more or less than what it should do as contained in the regulation.

This research method is a normative method with a statutory approach (*statue approach*) and conceptual approach (*conceptual approach*), the data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation and decisions on secondary legal materials, the opinions of experts.

One of the many functions of government is to provide public services (*public service*) as well as possible in accordance with the needs and or requirements of the community members. Providing these services is said to be a government administration service. The government's actions that abuse the authority to carry out administrative services in terms of issuing State Administrative decisions can have a detrimental effect on other people, as stated in article 9 of Law No. 51 of 2009, where State Administrative decisions are in the form of written decisions issued by government bodies and or officials based on applicable laws and regulations but have legal consequences for a person or civil legal entity. The emergence of legal consequences for other people due to the emergence of the State Administrative Decision becomes the authority of the State Administrative Court to be able to receive, examine, and provide results of decisions that have permanent legal force.

- H. Reference list : 27 books + 5 legislation
I. Supervisor I : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
Supervisor II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 24 January 2023
Writer

Steven Mart